



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **35471**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **25.777.192.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 595 m2/294 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000
2. Tanah Seluas 150000 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 138.596.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 138.596.000
5. Bangunan Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **3.500.000.000**

1. MOBIL, CHRYSLER JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, JEEP WRANGLER JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOBIL, LEXUS LAND CRUISER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---****D. SURAT BERHARGA** Rp. **2.600.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **839.674.538**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.000.000.000
Sub Total	Rp.	33.716.866.538
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	33.716.866.538

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOSEF ADREANUS NAE SOI
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 35341

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 25.625.000.000

1. Tanah Seluas 1039 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 645 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 1360 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1173 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 5358 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 9380 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/402 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
10. Tanah Seluas 6240 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
11. Tanah Seluas 10815 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
12. Tanah Seluas 1968 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI



Rp. 20.000.000

13. Tanah Seluas 436 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

14. Tanah Seluas 2710 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000

15. Tanah Seluas 1025 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

16. Tanah Seluas 1059 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

17. Tanah Seluas 1060 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

18. Tanah Seluas 3956 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

19. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA NAGEKEO, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 615 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

21. Tanah Seluas 2170 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL
SENDIRI Rp. 600.000.000

22. Tanah Seluas 626 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 484.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HARRIER 2.4 2 WDAT Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2015, WARISAN Rp.
180.000.000

3. MOTOR, YAMAHA 28D MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 689.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.871.000.100

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.865.000.000

Sub Total Rp. 32.534.000.100

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 32.534.000.100



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BENEDIKTUS POLO MAING**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **127366**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.362.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/81 m² di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3009 m²/165 m² di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m²/626 m² di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **140.000.000**

1. MOTOR, ZUZUKI FU 150 SCD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI LX 150 H Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, ZUSUKI MINIBUS/TM2FX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **86.300.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **953.222.690****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.986.775.408****F. HARTA LAINNYA** Rp. **864.309.700****Sub Total** Rp. **5.392.607.798****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **5.392.607.798**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.